

**STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMER 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

SKRIPSI



dlsusun oleh :

Risky Wahyudl Irlanto

17.94.0007

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

2023

**STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMER 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada:
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta



disusun oleh

Risky Wahyudi Irlanto

17.94.0007

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

2023

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

RISKY WAHYUDI IRIANTO

17.94.0007

ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Telah di setujui oleh dosen pembimbing Skripsi
Pada tanggal 9 januari 2023

Dosen Pembimbing,



Hanantyo Sri Nugroho, S.IP., MA
(NIK. 190302316)

SKRIPSI

STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Di Susun Oleh :

Riky Wahyudi Irianto

17.94.0007

Yang telah dipertahankan serta disahkan Oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial

Tanggal : 20 Januari 2023

Dosen Penguji

1. Hanantyo Sri Nugroho, S.IP, MA
NIK (190302318)
2. Muhammad Zublan, S.IP, MA
NIK (190302318)
3. Ferry Wicaksono, S.IP, MA
NIK (190302316)

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial



Emha Taufiq Lutfi, S.T, M.Kom
NIK. (190302125)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 9 Januari 2023



Risky Wahyudi Irianto
NIM. 17.94.0007

MOTTO

QS. Ar-Rahman Ayat 13

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

“Bersyukur adalah cara yang paling elegan untuk berterima kasih kepada semua kenikmatan hidup yang telah kau rasakan selama ini dari sang pencipta”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya dan Penelitian ini Saya Persembahkan Teruntuk Kepada Alm. Bapak **Ir.Radikal Irianto Guluh** dan Ibu Saya **Hj. Ufawati S.Kep** yang Telah Banyak Berkorban Untuk saya selama menempuh Pendidikan Sarjana ini Serta Kepada Saudara-Saudara saya. Dan tak Luput Juga persembahan ini saya persembahkan kepada Istri **Reski Amalla Prawiro** Dan Anak Saya **Afzah Humaera Risky Guluh** Mudah-mudahan dengan Gelar yang bapak miliki ini menjadi ladang pahala dan rejeki bagi keluarga kecil kita. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2017 atas pengalaman yang saya miliki bertemu dengan kalian semua. Terima Kasih **Yogyakarta** kamu telah memberikan banyak pelajaran hidup.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil' alamin, shalom, Salam Sejahtera bagi kita semua puji Tuhan atas rahmat Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMER 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR” Skripsi non regular (Publikasi Jurnal) ini disusun guna memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata1 (S1) di Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta Dalam Penulisan karya Ilmiah ini ditemui beberapa kendala dalam penulisan, Motivasi dari orang-orang terdekat selama bimbingan Peulisan Ilmiah ini, sehingga penulis telah meneapai dengan hasil yang baik, maka dari itu tidak berlebihan dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada sebesar-besarnya kepada :

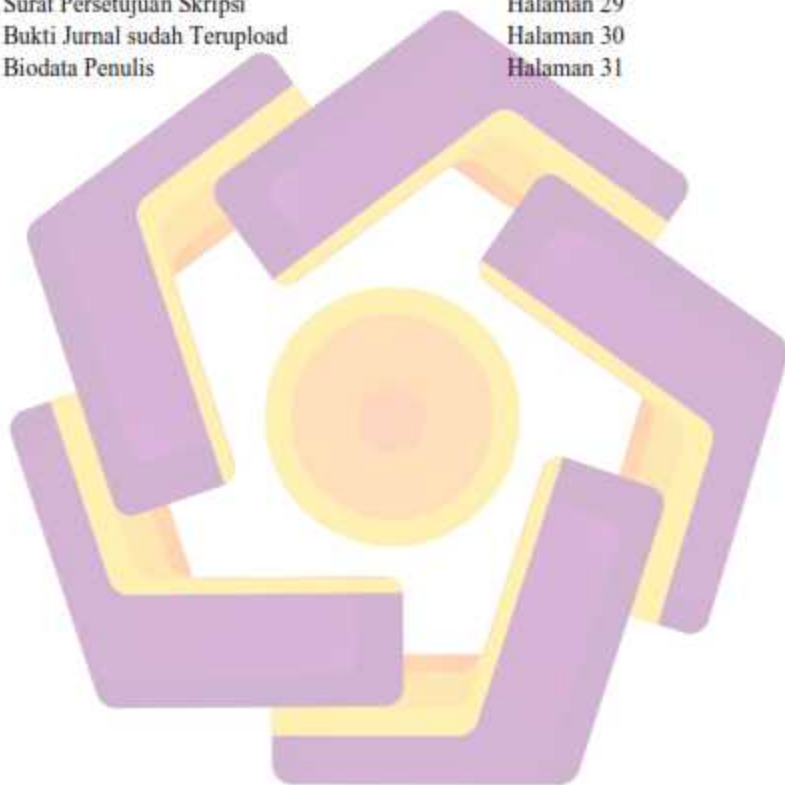
1. **Bapak Prof.Dr.M.Suyanto.,M.M.**, Selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta telah memberikan Ijin untuk menuntut Ilmu di Universitas Amikom Yogyakarta.
2. **Bapak Emha Taufiq Lutfi S.T.,M.Kom**, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan ijin dalam Penelitian ini sehingga memudahkan Penulis untuk melakukan Penelitian.
3. **Bapak Muhammad Zuhdan,S.IP., M.A.** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan ijin dalam Penelitian ini sehingga memudahkan Penulis dalam melakukan Penelitian.
4. **Bapak Hanantyo Sri Nugroho S.IP., M.A.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan motivasi,saran dan bimbingan yang luar biasa serta sangat peduli tentang saya dari awal sampai akhir dalam Penulisan Skripsi (Publikasi Jurnal) ini.
5. Orangtuaku **Alm. Ir Radikal Irianto dan Hj. Ulfawati S.Kep** dan Kepada Istri **Reski Amalia Prawiro** serta Anak Perempuan ku yang paling cantik **Afzah Humaera Reski Guluh** terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua
6. Terimakasih untuk Saudari-saudariku , mm den, mm nof , mm wie
7. Teman-Teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2017
8. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses kelancaran tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
PENGESAHAN.....	4
PERNYATAAN KEASLIAN.....	5
MOTTO.....	6
PERSEMBAHAN.....	7
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR LAMPIRAN.....	10
ABSTRACT.....	11
ABSTRAK.....	12
PUBLIKASI JURNAL.....	13
PENDAHULUAN.....	14
METODE PENELITIAN.....	17
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
KESIMPULAN.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing | Halaman 27 dan 28 |
| 2. Surat Persetujuan Skripsi | Halaman 29 |
| 3. Bukti Jurnal sudah Terupload | Halaman 30 |
| 4. Biodata Penulis | Halaman 31 |



Abstract

The purpose of the ratification of the *Omnibus Law* is that it is expected to be a small part of the national economic recovery effort, especially in pressing for economic transformation so that it can produce extensive jobs for the citizens. Not only that, the purpose of the existence of the Job Creation Act is to produce a wide range of jobs which are for the Indonesian people as a whole, in all regions of the Republic of Indonesia. With the implementation of the *Omnibus Law* in the Indonesian state, it becomes a question whether it is true if the will is in the same direction as or compatible with the legal system in Indonesia, which believes in the Civil Law System in making laws and regulations in Indonesia, considering that the *Omnibus Law* idea is better known for its implementation in countries which believe in the implementation of the *Omnibus Law*. Common Law System. The method used is literature review or library research, which contains theories relevant to research problems. *Omnibus Law* is a procedure for making laws and regulations and when viewed from the point of view of the legal system in Indonesia, the role of the Law as a result of the *Omnibus Law* procedure in the hierarchy of statutory regulations is the same as the Law. In terms of the form of government in the view of *Omnibus Law*, it can be said that democracy is the result of the merger of Polybius and Plato because the purpose of the end is the peace of the citizens. This merger means that democracy in Indonesia has the meaning of a form of government in obstructing state power. The President's role is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : *Omnibus Law, Government, Legislation, Cipta Kerja*



Abstrak

Tujuan pengesahan *Omnibus Law* ini diharapkan bisa jadi bagian kecil dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendesak transformasi ekonomi sehingga sanggup menghasilkan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat negara. Tidak hanya itu, tujuan dari adanya UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterapkannya *Omnibus Law* di negara Indonesia, menjadi pertanyaan apakah benar kehendak itu searah atau sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut Sistem Hukum Perdata dalam membuat peraturan perundang-undangan. di Indonesia, mengingat gagasan *Omnibus Law* lebih dikenal implementasinya di negara-negara yang meyakini implementasi *Omnibus Law*. Sistem Hukum Umum. Tata cara yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan, yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah riset. *Omnibus Law* adalah suatu tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan dan jika dilihat dari sudut pandang sistem hukum di Indonesia, peranan Undang-Undang sebagai hasil dari tata cara *Omnibus Law* dalam hierarkiperaturan perundang-undangan sama dengan Undang-Undang. Dari segi bentuk pemerintahan dalam pandangan *Omnibus Law* dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan hasil penggabungan antara Polybius dan Plato karena tujuan akhirnya adalah ketentraman warga negara. Penggabungan ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia memiliki arti sebagai bentuk pemerintahan dalam merintang kekuasaan negara. Peran Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : *Omnibus Law*, Pemerintah, Legislasi, Cipta Kerja

PUBLIKASI JURNAL

STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

¹ Risky Wahyudi Irianto G

¹ Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta, Sleman, Indonesia

risky_0007@students.amikom.ac.id

Abstract

The purpose of the ratification of the *Omnibus Law* is that it is expected to be a small part of the national economic recovery effort, especially in pressing for economic transformation so that it can produce extensive jobs for the citizens. Not only that, the purpose of the existence of the Job Creation Act is to produce a wide range of jobs which are for the Indonesian people as a whole, in all regions of the Republic of Indonesia. With the implementation of the *Omnibus Law* in the Indonesian state, it becomes a question whether it is true if the will is in the same direction as or compatible with the legal system in Indonesia, which believes in the Civil Law System in making laws and regulations in Indonesia, considering that the *Omnibus Law* idea is better known for its implementation in countries which believe in the implementation of the *Omnibus Law*. Common Law System. The method used is literature review or library research, which contains theories relevant to research problems. *Omnibus Law* is a procedure for making laws and regulations and when viewed from the point of view of the legal system in Indonesia, the role of the Law as a result of the *Omnibus Law* procedure in the hierarchy of statutory regulations is the same as the Law. In terms of the form of government in the view of *Omnibus Law*, it can be said that democracy is the result of the merger of Polybius and Plato because the purpose of the end is the peace of the citizens. This merger means that democracy in Indonesia has the meaning of a form of government in obstructing state power. The President's role is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : *Omnibus Law*, Government, Legislation, Cipta Kerja

Abstrak

Tujuan pengesahan *Omnibus Law* ini diharapkan bisa jadi bagian kecil dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendesak transformasi ekonomi sehingga sanggup menghasilkan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat negara. Tidak hanya itu, tujuan dari adanya UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterapkannya *Omnibus Law* di negara Indonesia, menjadi pertanyaan apakah benar kehendak itu searah atau sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut Sistem Hukum Perdata dalam membuat peraturan perundang-undangan, di Indonesia, mengingat gagasan *Omnibus Law* lebih dikenal implementasinya di negara-negara yang meyakini implementasi *Omnibus Law*. Sistem Hukum Umum. Tata cara yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan, yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah riset. *Omnibus Law* adalah suatu tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan dan jika dilihat dari sudut pandang sistem hukum di Indonesia, peranan Undang-Undang sebagai hasil dari tata cara *Omnibus Law* dalam hierarki peraturan perundang-undangan sama dengan Undang-Undang. Dari segi bentuk pemerintahan dalam pandangan *Omnibus Law* dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan hasil penggabungan antara Polybius dan Plato karena tujuan akhirnya adalah ketentraman warga negara. Penggabungan ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia memiliki arti sebagai bentuk pemerintahan dalam merintang kekuasaan negara. Peran Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : *Omnibus Law*, Pemerintah, Legislati, Cipta Kerja